

Maria Silvy E. Wangga

HUKUM PIDANA

PEMILU

PP3DT

(Pusat Pembelajaran, Penerbitan & Percetakan Digital Trisakti)



PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Pesta demokrasi merupakan momen yang sangat penting bagi setiap negara, di mana masing-masing negara mempunyai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa Pemilu di setiap negara selalu mengandung risiko baik bagi penyelenggara, pemain-pemain di dalamnya maupun pemilihnya. Di Indonesia Pemilihan Umum diadakan setiap lima tahun sekali dengan berbagai peristiwa yang menyenangkan hingga menegangkan bahkan memilukan karena berbagai pelanggaran yang ada.

Buku Hukum Pidana Pemilu ini membahas tentang berbagai sistem dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Pemilu, mulai dari sistem dan hukum hukumnya, tindak pidana, kebijakan politik hukum, juga tentang Undang-Undang Pemilihan Umum anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari tahap pematangan data pemilih, masa kampanye, masa tenang hingga penghitungan suara.

Di samping membahas hukum-hukum tindak pidana juga membahas lembaga-lembaga yang terkait, antara lain komisi-komisi, panitia-panitia serta kelompok-kelompok penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat kabupaten, provinsi-provinsi maupun Pusat, yang berada di dalam maupun di luar negeri. Mekanisme dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelanggaran serta perselisihan Pemilu juga dibahas di dalamnya.

Buku ini sangat bermanfaat bagi praktisi hukum, para mahasiswa, penyelenggara pemilu dan setiap warga negara pada umumnya, sehingga pelanggaran-pelanggaran tindak pidana dalam setiap penyelenggaraan pemilu dapat diminimalisir serta pesta demokrasi berjalan dengan baik.

ISBN 978-979-26-8999-0



9 789792 689990

(Pusat Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian & Pencetakan Digital (P3DIT))

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PROF ANDI HAMZAH	v
KATA PENGANTAR PENULIS	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Pemilu	1
B. Pengertian Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pemilu	10
C. Kebijakan Politik Hukum yang Berkaitan dengan Pemilu	15
BAB II UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU	23
A. Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD dalam Setiap Tahapan Pemilu	24
1. Tahap Pemutakhiran Data dalam Penyusunan Pemilih Tetap	24
2. Tahap Pendaftaran Peserta Pemilu atau Penetapan Peserta Pemilu atau Penetapan Jumlah Kursi atau Pencalonan DPR, DPD dan DPRD	29
3. Tahapan Masa Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD	33